

Ekoteologi Islam Indonesia Kontemporer: Analisis Komparatif Pemikiran Ekoteologi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah

Syahrul Kirom^{1*}

¹ UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

*Corresponding author: syahrulkirom1984@gmail.com

Abstrak: Krisis ekologis global telah berkembang menjadi persoalan multidimensional yang tidak hanya berdampak pada aspek lingkungan, tetapi juga memengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, politik, bahkan spiritual masyarakat. Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat kerusakan lingkungan yang tinggi menghadapi berbagai persoalan seperti deforestasi, perubahan iklim, pencemaran lingkungan, degradasi sumber daya alam, serta meningkatnya frekuensi bencana ekologis. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendekatan teknokratis dan regulatif semata belum cukup mampu mengatasi krisis ekologis secara komprehensif. Dalam konteks masyarakat religius seperti Indonesia, agama memiliki potensi besar sebagai sumber etika lingkungan sekaligus kekuatan transformasi sosial melalui pengembangan paradigma ekoteologi. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara komparatif konstruksi pemikiran dan praksis ekoteologi dalam dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretatif-kritis melalui metode studi kepustakaan yang diperkaya data lapangan terbatas. Analisis dilakukan terhadap dokumen resmi organisasi, hasil bahtsul mas'ail, keputusan muktamar, fatwa Majelis Tarjih, karya tokoh, serta berbagai literatur akademik mengenai ekoteologi Islam kontemporer. Analisis menggunakan pendekatan teologis, filosofis, sosio-historis, serta analisis komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua organisasi sama-sama membangun paradigma ekoteologi berdasarkan prinsip tauhid, khalifah, amanah, mīzān, serta maqāsid al-syarī'ah. Meskipun demikian, keduanya memperlihatkan karakter epistemologis yang berbeda. Nahdlatul Ulama mengembangkan ekoteologi melalui pendekatan fikih lingkungan, tasawuf, budaya lokal, dan tradisi pesantren sehingga menghasilkan model ekoteologi yang bersifat kultural-partisipatif. Sebaliknya, Muhammadiyah membangun paradigma ekoteologi melalui pendekatan tajdid, rasionalitas keilmuan, pendidikan modern, filantropi, dan tata kelola kelembagaan sehingga melahirkan model ekoteologi institusional-transformatif. Perbedaan epistemologi tersebut justru memperlihatkan komplementaritas dalam membangun gerakan lingkungan Islam di Indonesia. Penelitian ini menawarkan kebaruan berupa Model Ekoteologi Islam Transformatif yang mengintegrasikan dimensi teologis, etis, sosial, kultural, ilmiah, dan kelembagaan sebagai paradigma baru pengembangan gerakan lingkungan berbasis agama. Model tersebut menunjukkan bahwa penguatan ekoteologi tidak cukup berhenti pada tataran normatif, tetapi harus diwujudkan dalam transformasi kebijakan organisasi, pendidikan, gerakan sosial, dan perubahan perilaku ekologis masyarakat.

Kata Kunci: Ekoteologi, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Teologi Lingkungan, Islam Indonesia.

Pendahuluan

Krisis ekologis telah menjadi salah satu persoalan paling mendasar yang dihadapi masyarakat global pada abad ke-21. Perubahan iklim, degradasi ekosistem, hilangnya keanekaragaman hayati, pencemaran lingkungan, dan berbagai bentuk kerusakan ekologis tidak lagi dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan lingkungan, tetapi berkaitan erat dengan ketimpangan sosial, kehidupan ekonomi, kesehatan masyarakat, dan keberlanjutan kehidupan manusia. Kajian mengenai hubungan krisis iklim dan ketimpangan sosial menunjukkan bahwa persoalan ekologis telah berkembang menjadi isu multidimensional yang membutuhkan keterlibatan berbagai disiplin ilmu dan institusi sosial (Heriyanti et al., 2024). Oleh karena itu, respons terhadap krisis ekologis tidak cukup bertumpu pada teknologi dan regulasi, tetapi juga membutuhkan transformasi pada tingkat nilai, etika, budaya, dan spiritualitas.

Dalam konteks Indonesia, persoalan ekologis juga menjadi perhatian serius karena pembangunan, eksploitasi sumber daya alam, pencemaran, perubahan penggunaan lahan, serta berbagai bentuk degradasi lingkungan berinteraksi dengan kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa krisis ekologis tidak hanya berhubungan dengan persoalan teknis pengelolaan lingkungan, tetapi juga dengan cara manusia memandang alam dan menentukan posisi dirinya dalam tatanan kehidupan. Wasil dan Muizudin (2023) menunjukkan bahwa krisis ekologis dapat dibaca sebagai bagian dari krisis spiritual dan paradigma manusia dalam memperlakukan alam. Dengan demikian, problem lingkungan membutuhkan rekonstruksi cara pandang yang tidak lagi menempatkan alam semata-mata sebagai objek eksploitasi, tetapi sebagai bagian dari sistem kehidupan yang memiliki nilai moral dan spiritual.

Perdebatan mengenai akar etis krisis ekologis telah berkembang dalam kajian agama dan lingkungan. Jenkins (2009) menunjukkan bahwa diskursus mengenai agama dan lingkungan setelah kritik Lynn White berkembang ke arah yang lebih kompleks, terutama dalam menilai bagaimana tradisi keagamaan dapat membentuk etika lingkungan sekaligus menyediakan sumber daya moral untuk merespons kerusakan ekologis.

Perspektif tersebut memperlihatkan bahwa agama dapat memiliki peran penting dalam membangun kesadaran ekologis apabila ajaran teologis diterjemahkan ke dalam etika dan tindakan sosial yang relevan.

Dalam perkembangan tersebut muncul diskursus ekoteologi (*ecoteology*), yaitu pendekatan teologis yang merefleksikan hubungan antara Tuhan, manusia, dan alam dalam satu kerangka tanggung jawab moral. Ekoteologi memperluas pembahasan teologis dari relasi manusia dengan Tuhan menuju hubungan yang juga mencakup keberadaan alam sebagai ciptaan yang memiliki nilai dan kedudukan dalam struktur kehidupan. Dalam perspektif ini, alam tidak hanya dipahami sebagai sumber daya ekonomi, tetapi sebagai bagian dari ciptaan Tuhan yang harus dihormati, dijaga, dan dipelihara. Wasil dan Muizudin (2023) menempatkan ekoteologi sebagai salah satu kerangka yang relevan dalam merespons krisis ekologis, sedangkan Suratin dan Fadlillah (2025) menekankan keterhubungan spiritual antara manusia, alam, dan Tuhan dalam tradisi Islam.

Islam memiliki sumber konseptual yang kuat bagi pembentukan paradigma ekoteologis. Konsep *tauḥīd*, *khalīfah fī al-arḍ*, *amānah*, *mīzān*, dan kemaslahatan memberikan kerangka bagi pemahaman bahwa manusia bukan pemilik absolut alam, tetapi memiliki tanggung jawab dalam mengelola kehidupan secara proporsional. Rakhmat (2022) menunjukkan bahwa konsep *khalīfah* mengandung konsekuensi etik terhadap tanggung jawab manusia dalam memelihara lingkungan. Perspektif tersebut juga dapat dikembangkan melalui *fiqh al-bī'ah*, yang menempatkan persoalan lingkungan dalam kerangka hukum dan tanggung jawab keislaman (Zuhdi, 2015). Lebih jauh, pelestarian lingkungan dapat diposisikan dalam perkembangan diskursus *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya melalui gagasan *ḥifẓ al-bī'ah* sebagai bagian dari orientasi perlindungan dan keberlanjutan kehidupan (Khuluq, 2024).

Namun demikian, keberadaan dasar normatif yang kuat belum secara otomatis menghasilkan praksis ekologis yang sebanding. Salah satu persoalan penting dalam ekoteologi Islam adalah kesenjangan antara doktrin keagamaan dan implementasi sosial. Prinsip mengenai amanah manusia, larangan melakukan kerusakan, maupun pemeliharaan keseimbangan ekologis dapat berhenti pada tataran diskursus apabila tidak diterjemahkan ke dalam pendidikan, gerakan masyarakat, advokasi, dan kelembagaan. Oleh karena itu, kajian mengenai organisasi keagamaan menjadi penting untuk mengetahui bagaimana nilai-nilai teologis ditransformasikan menjadi praktik lingkungan.

Dalam konteks Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah merupakan dua organisasi Islam besar yang memiliki jaringan kelembagaan dan pengaruh sosial luas. NU tumbuh melalui tradisi Ahlussunnah wal Jama'ah, fikih mazhab, tasawuf, pesantren, dan interaksi yang kuat dengan tradisi lokal. Genealogi teologis NU memperlihatkan posisi penting Ahlussunnah wal Jama'ah dalam pembentukan identitas dan struktur pemikiran keagamaannya (Riyadi, 2012). Perkembangan identitas Aswaja juga terus mengalami kontestasi dan artikulasi dalam ruang sosial kontemporer, termasuk ruang digital (Putra et al., 2025). Secara historis, struktur kelembagaan dan perkembangan NU juga menunjukkan kemampuannya beradaptasi terhadap berbagai persoalan sosial yang berkembang di Indonesia (Rudwan, 2023).

Dalam persoalan lingkungan, tradisi NU mulai menghasilkan artikulasi ekologis melalui konsep *fiqh al-bī'ah*, pendidikan pesantren, advokasi masyarakat, serta gerakan kelembagaan. Huda (2023) menunjukkan kontribusi komunitas NU dalam isu kelestarian lingkungan hidup di Indonesia. Di tingkat konseptual, nilai-nilai Aswaja juga mulai dibaca melalui perspektif ekoteologis sebagai dasar pembentukan etika lingkungan (Firmando & Setiawati, 2025). Pada lingkungan pesantren, *fiqh al-bī'ah* dikembangkan sebagai salah satu strategi pembentukan *Islamic environmentalism* yang menghubungkan norma keagamaan dengan praktik pengelolaan lingkungan (Moch. Ikhwani et al., 2021). Perkembangan tersebut juga terlihat melalui pengembangan konsep *green pesantren* serta keterlibatan jaringan NU dalam membangun kesadaran ekologis berbasis pendidikan Islam (Maghfiroh et al., 2024).

Praksis ekologis NU tidak hanya berkembang melalui diskursus teologis dan pendidikan pesantren, tetapi juga melalui keterlibatan kelembagaan dan komunitas dalam mitigasi perubahan iklim. Kajian mengenai LPBI NU, misalnya, menunjukkan bagaimana organisasi keagamaan dapat menjadi aktor lokal dalam menghubungkan nilai keagamaan dengan agenda mitigasi perubahan iklim (Ilmia & Salsabila, 2025). Dengan demikian, ekoteologi NU dapat dipahami melalui hubungan antara teologi Aswaja, fikih, tradisi pesantren, kearifan lokal, dan gerakan sosial-ekologis.

Muhammadiyah mengembangkan karakter yang berbeda. Tradisi keagamaannya banyak dikaitkan dengan *tajdid*, rasionalisasi pemahaman agama, penguatan pendidikan modern, dan pembangunan institusi sosial. Dalam konteks lingkungan, orientasi tersebut berkembang melalui keputusan organisasi dan gerakan kelembagaan yang menempatkan persoalan ekologis sebagai bagian dari tanggung jawab keagamaan. Dokumen resmi Muhammadiyah memperlihatkan bahwa isu lingkungan dan keberlanjutan telah menjadi bagian dari agenda strategis organisasi (Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2022).

Praksis tersebut antara lain diwujudkan melalui gerakan Majelis Lingkungan Hidup Muhammadiyah. Setiawan et al. (2022) menunjukkan bahwa gerakan ekoteologis Muhammadiyah berkembang sebagai respons terhadap problem tata kelola lingkungan dengan menghubungkan nilai keagamaan dan aktivisme ekologis. Perspektif teologi Al-Ma'un juga diperluas dari persoalan kemiskinan dan kemanusiaan menuju solidaritas ekologis dan respons terhadap krisis iklim (Permadi et al., 2022). Pada tingkat kaderisasi, perhatian terhadap

lingkungan diwujudkan pula melalui gerakan kader hijau Muhammadiyah yang berupaya memperkuat aktivisme lingkungan sebagai bagian dari dakwah sosial (Nurdin, 2024).

Dengan demikian, NU dan Muhammadiyah sama-sama mengembangkan respons ekologis, tetapi berangkat dari tradisi epistemologis dan kelembagaan yang memiliki karakter berbeda. NU cenderung mengembangkan ekoteologi melalui jaringan Aswaja, fikih mazhab, pesantren, tradisi lokal, dan *fiqh al-bī'ah*, sedangkan Muhammadiyah banyak mengartikulasikannya melalui *tajdid*, teologi sosial, kelembagaan modern, dan orientasi gerakan. Perbedaan tersebut tidak harus dipahami secara oposisional, tetapi dapat dilihat sebagai dua model artikulasi Islam Indonesia dalam merespons persoalan ekologis.

Sejumlah penelitian telah membandingkan atau mempertemukan gerakan ekologis NU dan Muhammadiyah. Mardhiah et al. (2014) telah mengkaji konsep gerakan ekoteologi Islam pada kedua organisasi, sementara kajian yang lebih baru menganalisis konstruksi fikih lingkungan NU dan Muhammadiyah melalui hubungan antara teks, konteks, dan konservasi alam (Alamri et al., 2025). Fannani (2025) juga menunjukkan bagaimana tradisi Aswaja dan teologi Al-Ma'un dapat bertemu dalam aktivisme pelestarian Sungai Brantas. Pada tingkat yang lebih luas, perkembangan *religious environmentalism* di Indonesia menunjukkan keterkaitan yang semakin kompleks antara etika agama, politik, gerakan sosial, dan kebijakan lingkungan (Billahi et al., 2025).

Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut masih menyisakan ruang pengembangan teoretis. Sebagian penelitian lebih menitikberatkan pada aspek normatif, sebagian pada gerakan kelembagaan, sedangkan sebagian lainnya berfokus pada praktik lokal. Kajian yang secara sistematis memperbandingkan konstruksi ekoteologi NU dan Muhammadiyah melalui dimensi ontologis, epistemologis, aksiologis, dan praksis sekaligus masih perlu dikembangkan. Di samping itu, peluang untuk menyusun sintesis konseptual dari kedua tradisi tersebut sebagai model ekoteologi Islam Indonesia juga masih terbuka.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis secara komparatif konstruksi pemikiran dan praksis ekoteologi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Analisis diarahkan tidak hanya untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan kedua organisasi, tetapi juga untuk merekonstruksi hubungan antara basis teologis, epistemologi keagamaan, orientasi etis, dan implementasi sosial-ekologisnya. Dari analisis tersebut, penelitian ini menawarkan paradigma **Ekoteologi Islam Transformatif** sebagai sintesis konseptual yang menghubungkan dimensi teologis, etis, sosial, kultural, ilmiah, dan kelembagaan dalam merespons krisis ekologis kontemporer. Paradigma ini diharapkan dapat memperkaya diskursus filsafat lingkungan Islam sekaligus memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan gerakan dan kebijakan lingkungan berbasis nilai keagamaan di Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian kepustakaan (*library research*) dan paradigma interpretatif-kritis. Pendekatan interpretatif digunakan untuk memahami konstruksi gagasan, doktrin teologis, tradisi intelektual, serta praksis ekologis yang berkembang dalam Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Sementara itu, perspektif kritis digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana konstruksi pemikiran dan gerakan kedua organisasi tersebut mampu merespons kompleksitas krisis ekologis kontemporer. Dengan demikian, penelitian tidak hanya mendeskripsikan pandangan kedua organisasi, tetapi juga menganalisis struktur epistemologis dan implikasi praksisnya.

Secara analitis, penelitian memadukan pendekatan teologis-normatif, sosio-historis, filosofis-etis, dan komparatif. Pendekatan teologis-normatif digunakan untuk mengidentifikasi dasar pemikiran lingkungan yang berhubungan dengan Al-Qur'an, Hadis, fikih, *maqāsid al-syarī'ah*, serta konsep-konsep teologis seperti *tauḥīd*, *khalīfah*, *amānah*, dan *mīzān*. Pendekatan sosio-historis digunakan untuk memahami perkembangan respons ekologis NU dan Muhammadiyah dalam konteks sosial, politik, dan lingkungan Indonesia. Pendekatan filosofis-etis digunakan untuk menganalisis asumsi ontologis mengenai kedudukan alam, dasar epistemologis pembentukan pengetahuan lingkungan, serta orientasi aksiologis yang mendasari tanggung jawab ekologis. Adapun pendekatan komparatif digunakan untuk memetakan persamaan, perbedaan, dan kemungkinan sintesis antara konstruksi ekoteologi kedua organisasi.

Sumber data penelitian terdiri atas sumber primer dan sekunder. Sumber primer mencakup dokumen resmi organisasi, keputusan muktamar, hasil Bahtsul Masā'il NU, keputusan dan dokumen Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, serta dokumen kelembagaan lain yang berkaitan dengan isu lingkungan. Dokumen resmi Muhammadiyah, misalnya, digunakan untuk mengidentifikasi arah kebijakan dan orientasi organisasi terhadap persoalan sosial-ekologis (Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2022). Selain itu, hasil penelitian mengenai metodologi Bahtsul Masail digunakan untuk memahami struktur epistemologis pengambilan keputusan keagamaan di lingkungan NU (Mahfudin, 2021).

Sumber sekunder terdiri atas buku, artikel jurnal, tesis, disertasi, serta penelitian terdahulu mengenai ekoteologi Islam, *fiqh al-bī'ah*, etika lingkungan, gerakan ekologis NU dan Muhammadiyah, serta *religious environmentalism* di Indonesia. Literatur tersebut digunakan untuk merekonstruksi perkembangan diskursus sekaligus menguji posisi penelitian ini dalam kajian yang telah ada.

Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi literatur. Data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan beberapa kategori analisis, meliputi basis teologis, konstruksi relasi Tuhan-manusia-alam, sumber epistemologis, orientasi etis, mekanisme produksi hukum dan fatwa, bentuk kelembagaan, serta praksis ekologis. Analisis dilakukan melalui pembacaan isi secara sistematis, perbandingan antarsumber, dan interpretasi kritis untuk mengidentifikasi pola konseptual serta karakteristik masing-masing organisasi.

Validitas analisis dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan dokumen resmi organisasi, karya atau dokumen intelektual, serta hasil penelitian akademik mengenai NU dan Muhammadiyah. Triangulasi konseptual juga dilakukan melalui dialog antara ekoteologi Islam, etika lingkungan, *fiqh al-bī'ah*, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan studi mengenai gerakan sosial-keagamaan. Melalui prosedur tersebut, penelitian diarahkan tidak hanya untuk menghasilkan deskripsi komparatif, tetapi juga membangun rekonstruksi konseptual mengenai hubungan agama dan lingkungan dalam konteks Islam Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

1. Konstruksi Ekoteologi Nahdlatul Ulama

a) Fondasi Epistemologis Ekoteologi Nahdlatul Ulama

Konstruksi ekoteologi Nahdlatul Ulama (NU) tidak lahir semata-mata sebagai respons spontan terhadap meningkatnya isu perubahan iklim global pada abad ke-21, tetapi dapat dipahami sebagai kelanjutan dari tradisi intelektual Islam yang telah berkembang dalam lingkungan pesantren dan komunitas NU. Pemikiran ekologis NU terbentuk melalui dialektika antara ajaran normatif Islam, tradisi fikih mazhab, tasawuf Sunni, serta kearifan lokal Nusantara. Kombinasi tersebut menghasilkan corak ekoteologi yang menempatkan persoalan lingkungan dalam kerangka keagamaan sekaligus sosial-kultural.

Secara historis, Nahdlatul Ulama didirikan pada tahun 1926 sebagai organisasi yang berupaya mempertahankan dan mengembangkan tradisi Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja) dalam menghadapi perubahan sosial dan perkembangan pemikiran Islam pada masa kolonial (Rudwan, 2023). Orientasi tersebut kemudian membentuk karakter epistemologis NU yang mempertahankan kesinambungan antara teks keagamaan, otoritas ulama, tradisi mazhab, dan realitas sosial. Dalam konteks lingkungan, pola epistemologis tersebut memungkinkan persoalan ekologis dibaca sebagai bagian dari tanggung jawab keagamaan untuk menjaga keteraturan dan keberlanjutan ciptaan Allah.

Perspektif ekologis NU tidak hanya berangkat dari observasi empiris mengenai kerusakan lingkungan, tetapi juga dari kesadaran teologis mengenai posisi manusia dalam struktur penciptaan. Alam dipahami bukan sekadar sebagai objek ekonomi, melainkan sebagai bagian dari ciptaan Tuhan yang memiliki nilai spiritual dan moral. Dalam kerangka tersebut, relasi manusia dengan lingkungan bergerak dari paradigma kepemilikan absolut menuju paradigma amanah. Manusia memiliki hak untuk memanfaatkan sumber daya alam, tetapi pemanfaatan tersebut harus mempertimbangkan keseimbangan ekologis, kemaslahatan, serta keberlanjutan kehidupan (Huda, 2023).

Konstruksi tersebut memperlihatkan kecenderungan pergeseran dari paradigma antroposentris menuju paradigma teo-ekosentris. Allah ditempatkan sebagai pusat orientasi seluruh kehidupan, sedangkan manusia dan alam dipahami sebagai bagian dari tatanan ciptaan yang saling berhubungan. Dalam perspektif ekoteologi Aswaja, alam tidak hanya memiliki nilai berdasarkan manfaat ekonominya bagi manusia, tetapi juga memperoleh kedudukan moral sebagai ciptaan yang perlu dihormati dan dijaga keberlangsungannya (Firnando & Setiawati, 2025).

b) Tauhid sebagai Basis Ontologi Ekologis

Dalam konstruksi teologis NU, tauhid tidak hanya dipahami sebagai pengakuan terhadap keesaan Allah, tetapi juga memiliki konsekuensi terhadap cara manusia memahami hubungan antara Tuhan, manusia, dan alam. Genealogi teologi NU menunjukkan kuatnya tradisi Ahlussunnah wal Jama'ah dalam membentuk cara pandang keagamaan organisasi tersebut, termasuk dalam memahami keteraturan ciptaan dan tanggung jawab manusia di dalamnya (Riyadi, 2012).

Tauhid dalam perspektif ekologis menempatkan seluruh realitas sebagai ciptaan yang berada dalam kehendak dan kekuasaan Allah. Karena itu, pemisahan yang terlalu tajam antara kehidupan spiritual dan kehidupan ekologis menjadi problematis. Kerusakan lingkungan dapat dipahami bukan hanya sebagai persoalan teknis, tetapi juga sebagai tanda melemahnya tanggung jawab manusia terhadap ciptaan Tuhan. Dalam kerangka tersebut, kesadaran teologis mempunyai implikasi langsung terhadap pembentukan etika lingkungan.

Tradisi Aswaja yang berkembang dalam NU juga memiliki hubungan kuat dengan pemikiran teologi Sunni dan tasawuf, terutama tradisi Al-Ghazali dan tokoh-tokoh tasawuf yang menekankan hubungan antara pengetahuan tentang Tuhan, penyucian jiwa, dan pembentukan akhlak. Pengaruh tasawuf Al-Ghazali dalam kehidupan keislaman Indonesia menunjukkan bagaimana dimensi spiritual dapat menjadi fondasi bagi orientasi

moral dan sosial umat Islam (Ismail & Uyuni, 2019).

Konsekuensi etis dari tauhid adalah penolakan terhadap tindakan berlebihan (*isrāf*) dan kerusakan (*fasād fi al-arḍ*). Dalam perspektif ini, pemeliharaan alam tidak sekadar menjadi aktivitas sosial, tetapi dapat dipahami sebagai bagian dari aktualisasi iman dan tanggung jawab keagamaan. Firnando dan Setiawati (2025) menunjukkan bahwa nilai-nilai Aswaja dapat dikembangkan menjadi basis etika lingkungan yang menghubungkan dimensi teologis dengan perilaku ekologis.

Konsep *mīzān* atau keseimbangan juga memberikan dasar penting bagi orientasi tersebut. Keseimbangan ekologis dapat dipahami sebagai bagian dari keteraturan ciptaan yang tidak boleh dirusak melalui eksploitasi berlebihan. Dengan demikian, konservasi, rehabilitasi lingkungan, dan pembatasan penggunaan sumber daya alam memperoleh makna tidak hanya sebagai tindakan pragmatis, tetapi juga sebagai konsekuensi etis dari keyakinan keagamaan.

c) Fikih Lingkungan sebagai Transformasi Etika Ekologis

Salah satu karakteristik penting dalam konstruksi ekoteologi NU adalah upaya mentransformasikan prinsip-prinsip keagamaan ke dalam kerangka *fiqh al-bī'ah* atau fikih lingkungan. Pendekatan ini memungkinkan persoalan ekologis dibahas bukan hanya sebagai anjuran moral, tetapi juga sebagai bagian dari diskursus hukum Islam. Pengembangan fikih lingkungan menunjukkan bahwa tradisi hukum Islam memiliki kapasitas untuk merespons persoalan ekologis yang berkembang dalam masyarakat modern (Zuhdi, 2015).

Dalam lingkungan NU dan pesantren, *fiqh al-bī'ah* berkembang sebagai salah satu strategi untuk membangun kesadaran lingkungan berbasis ajaran Islam. Kajian mengenai pesantren menunjukkan bahwa fikih lingkungan dapat menjadi instrumen penting dalam membangun *Islamic environmentalism* melalui pendidikan, pembentukan perilaku, dan penguatan tanggung jawab masyarakat terhadap lingkungan (Moch. Ikhwani et al., 2021).

Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, perlindungan lingkungan memiliki hubungan dengan perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), harta (*ḥifẓ al-māl*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan keberlanjutan kehidupan secara lebih luas. Kerusakan ekologis dapat mengancam kesehatan, mata pencaharian, keamanan pangan, serta keberlangsungan generasi mendatang. Oleh karena itu, tindakan yang menimbulkan pencemaran, deforestasi, dan eksploitasi berlebihan dapat dinilai bertentangan dengan kemaslahatan yang menjadi salah satu orientasi utama hukum Islam (Zuhdi, 2015).

Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa fikih lingkungan memperluas cakupan hukum Islam dari relasi antarmanusia menuju relasi manusia dengan ekosistem. Perluasan ini tidak berarti meninggalkan struktur fikih klasik, tetapi mengembangkan penerapannya terhadap persoalan baru. Dengan demikian, *fiqh al-bī'ah* dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi hukum Islam terhadap perubahan sosial-ekologis kontemporer.

d) Tasawuf Ekologis sebagai Basis Kesadaran Lingkungan

Dimensi spiritual merupakan karakter penting lainnya dalam konstruksi ekoteologi NU. Tradisi tasawuf Ahlussunnah wal Jama'ah memberikan landasan bagi pembentukan kesadaran bahwa krisis ekologis tidak hanya berkaitan dengan lemahnya regulasi atau teknologi, tetapi juga dapat berhubungan dengan orientasi moral dan spiritual manusia. Tradisi Aswaja sendiri terus berkembang dan mengalami artikulasi baru dalam berbagai konteks sosial kontemporer (Putra et al., 2025).

Pengaruh tasawuf Al-Ghazali dalam tradisi Islam Indonesia menegaskan pentingnya penyucian jiwa (*tazkiyat al-nafs*) dan pembentukan akhlak dalam kehidupan keagamaan (Ismail & Uyuni, 2019). Dalam konteks ekologis, prinsip tersebut dapat dikembangkan untuk menjelaskan hubungan antara transformasi batin dan pembentukan perilaku terhadap lingkungan. Individu yang memiliki kesadaran spiritual tidak semestinya memahami alam hanya sebagai sumber objek konsumsi, tetapi sebagai bagian dari ciptaan Allah yang memiliki nilai dan harus diperlakukan secara bertanggung jawab.

Perspektif ini memberi ruang bagi pengembangan konsep spiritual ecology. Hubungan dengan alam tidak hanya ditentukan oleh aturan formal, tetapi juga oleh kesadaran batin mengenai keterhubungan manusia dengan lingkungan. Kajian mengenai ekologi spiritual dan kearifan lokal di Indonesia menunjukkan bahwa nilai-nilai spiritual dan budaya dapat menjadi fondasi penting bagi praktik lingkungan yang berkelanjutan (Yulisinta et al., 2024).

Dalam kerangka tersebut, nilai seperti *zuhud*, *i'tidāl*, dan penghindaran terhadap *isrāf* dapat direkontekstualisasikan sebagai basis bagi gaya hidup ekologis. *Zuhud* tidak harus dimaknai sebagai penolakan terhadap dunia, melainkan sebagai sikap tidak berlebihan terhadap kepemilikan dan konsumsi. *I'tidāl* memberikan orientasi keseimbangan, sedangkan larangan *isrāf* dapat dikembangkan menjadi kritik terhadap konsumsi dan eksploitasi yang melampaui kebutuhan.

Dengan demikian, pendekatan tasawuf ekologis memperluas agenda lingkungan dari perubahan eksternal menuju transformasi internal. Perubahan kebijakan dan teknologi tetap penting, tetapi keberlanjutan ekologis juga membutuhkan perubahan cara manusia memandang kebutuhan, konsumsi, alam, dan tujuan kehidupan. Pada titik

ini, dimensi spiritual dapat memberikan kontribusi terhadap pembentukan karakter ekologis yang lebih berkelanjutan.

e) **Khalifah dan Amanah sebagai Etika Tanggung Jawab Ekologis**

Konsep *khalīfah fī al-ard* merupakan salah satu fondasi penting dalam pengembangan ekoteologi Islam. Dalam perspektif ekologis, konsep khalifah tidak tepat dipahami sebagai legitimasi terhadap dominasi manusia atas alam, tetapi sebagai mandat moral yang membebankan tanggung jawab kepada manusia untuk menjaga keberlangsungan ciptaan. Rakhmat (2022) menunjukkan bahwa konsep khalifah dapat menjadi basis etis untuk menempatkan manusia sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Keistimewaan manusia karena memiliki akal dan kapasitas moral tidak memberikan hak absolut untuk mengeksploitasi alam. Sebaliknya, kemampuan tersebut justru memperbesar tanggung jawab. Kekuasaan atas sumber daya alam perlu ditempatkan sebagai amanah yang penggunaannya harus mempertimbangkan kemaslahatan, keadilan, dan keberlanjutan. Dalam kerangka demikian, eksploitasi yang menghasilkan kerusakan dapat dipahami sebagai kegagalan manusia menjalankan tanggung jawab ekologisnya.

Konsep amanah juga dapat diperluas dari dimensi individual menuju dimensi sosial dan kelembagaan. Perlindungan lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga pemerintah, organisasi masyarakat, lembaga keagamaan, dunia usaha, dan komunitas lokal. Dengan demikian, ekoteologi NU memiliki potensi berkembang dari etika personal menjadi etika publik yang menghubungkan tanggung jawab keagamaan dengan tata kelola lingkungan.

Secara aksiologis, konsep khalifah dan amanah menuntut agar aktivitas ekonomi mempertimbangkan kapasitas ekologis, pembangunan memperhatikan kemaslahatan jangka panjang, dan kebijakan publik melindungi kepentingan generasi mendatang. Perspektif tersebut memperlihatkan adanya titik temu antara etika Islam dan gagasan pembangunan berkelanjutan, terutama dalam hal tanggung jawab intergenerasional.

f) **Bahtsul Masā'il sebagai Instrumen Transformasi Fikih Ekologis**

Kontribusi penting NU terhadap pengembangan ekoteologi terletak pada mekanisme Bahtsul Masā'il sebagai ruang produksi dan pengembangan pemikiran hukum Islam. Bahtsul Masā'il memungkinkan persoalan sosial kontemporer dibahas melalui dialog antara teks, tradisi fikih, metodologi istinbāt, dan realitas masyarakat. Mahfudin (2021) menunjukkan bahwa metodologi istinbāt dalam Bahtsul Masā'il memiliki karakter yang memungkinkan hukum Islam merespons persoalan yang terus berkembang.

Melalui kerangka tersebut, persoalan ekologis dapat ditempatkan sebagai objek pembahasan hukum Islam. Pencemaran, eksploitasi sumber daya, kerusakan hutan, pengelolaan sampah, dan berbagai persoalan lingkungan dapat dianalisis melalui konsep kemaslahatan, pencegahan kerusakan, serta tanggung jawab manusia terhadap kehidupan. Pendekatan *fiqh al-bī'ah* memberikan dasar normatif untuk membaca krisis ekologis sebagai persoalan hukum dan etika Islam (Zuhdi, 2015).

Dalam konteks pesantren, pengembangan fikih lingkungan juga menunjukkan bahwa norma keagamaan dapat diterjemahkan ke dalam pendidikan dan praktik sosial. *Fiqh al-bī'ah* dapat berfungsi sebagai strategi untuk membentuk kesadaran ekologis santri sekaligus memperluas pemahaman bahwa masalah lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab keagamaan (Moch. Ikhwan et al., 2021).

Dengan demikian, Bahtsul Masā'il berpotensi menjadi mekanisme produksi fikih ekologis yang bersifat kontekstual. Perannya tidak hanya menentukan kategori halal, haram, atau boleh terhadap suatu tindakan, tetapi juga menghubungkan hukum Islam dengan kemaslahatan sosial dan keberlanjutan ekologis. Pendekatan tersebut memperluas cakupan *maqāṣid al-syarī'ah* dengan memberikan perhatian lebih serius terhadap keberlangsungan ekosistem sebagai prasyarat bagi kehidupan manusia.

Kearifan Lokal dan Tradisi Pesantren sebagai Basis Gerakan Ekologis

Karakter lain dalam konstruksi ekoteologi NU adalah keterbukaannya terhadap kearifan lokal. Tradisi sosial-keagamaan NU berkembang melalui interaksi panjang dengan kebudayaan masyarakat Nusantara. Dalam konteks ekologis, hubungan tersebut membuka kemungkinan bagi nilai-nilai lokal mengenai pengelolaan air, hutan, pertanian, dan sumber daya alam untuk dipertemukan dengan prinsip-prinsip Islam.

Kajian tentang spiritual ecology dan kearifan lokal menunjukkan bahwa praktik budaya dapat memiliki fungsi penting dalam mempertahankan relasi yang lebih berkelanjutan antara manusia dan lingkungan (Yulisinta et al., 2024). Tradisi seperti pemeliharaan sumber air, penghormatan terhadap kawasan tertentu, kegiatan bersih desa, maupun berbagai bentuk syukur terhadap hasil alam dapat memiliki dimensi ekologis apabila berfungsi membangun tanggung jawab kolektif terhadap lingkungan.

Pesantren memiliki posisi strategis dalam proses tersebut karena berfungsi tidak hanya sebagai pusat transmisi pengetahuan keagamaan, tetapi juga sebagai ruang pembentukan kebiasaan dan karakter. Perkembangan konsep green pesantren menunjukkan bahwa pesantren dapat mengintegrasikan pendidikan agama dengan pengelolaan lingkungan, seperti penghijauan, pengelolaan sampah, konservasi air, pertanian berkelanjutan, dan pembentukan budaya hidup ekologis (Maghfiroh et al., 2024).

Model tersebut memperlihatkan bahwa pendidikan ekologis berbasis pesantren tidak hanya memberikan pengetahuan mengenai lingkungan, tetapi juga membangun praktik kehidupan sehari-hari. Nilai agama dengan demikian memperoleh bentuk konkret melalui tata kelola kelembagaan dan kebiasaan komunitas pesantren.

Transformasi ekoteologi NU juga berkembang melalui kelembagaan yang lebih formal, termasuk Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU). Kajian mengenai LPBI NU menunjukkan bahwa lembaga ini memiliki peran dalam menghubungkan komunitas lokal dengan agenda mitigasi perubahan iklim, penanggulangan bencana, dan penguatan kesadaran lingkungan (Ilmia & Salsabila, 2025). Keberadaan kelembagaan tersebut menunjukkan bahwa diskursus lingkungan dalam NU telah bergerak dari tataran normatif menuju bentuk-bentuk praksis sosial.

Meskipun demikian, implementasi ekoteologi NU masih menghadapi sejumlah tantangan. Internalisasi nilai ekologis di tingkat akar rumput belum selalu berlangsung secara merata, sebagian aktivitas masih bergantung pada program tertentu, dan koordinasi antaraktor dalam isu lingkungan masih memerlukan penguatan. Karena itu, transformasi dari program ekologis menuju budaya organisasi menjadi salah satu tantangan penting bagi keberlanjutan gerakan lingkungan NU.

Berdasarkan keseluruhan analisis, konstruksi ekoteologi NU dapat dipahami sebagai model kultural-partisipatif yang mengintegrasikan teologi Aswaja, tasawuf, fikih lingkungan, kearifan lokal, pendidikan pesantren, dan kelembagaan sosial. Tauhid memberikan fondasi ontologis, konsep khalifah dan amanah membentuk struktur tanggung jawab, fiqh al-bī'ah memberikan legitimasi normatif, tasawuf membangun orientasi spiritual, sementara pesantren dan lembaga seperti LPBI NU menerjemahkan nilai tersebut ke dalam praksis sosial. Konstruksi tersebut menjadi kontribusi khas Nahdlatul Ulama dalam perkembangan ekoteologi Islam Indonesia sekaligus menyediakan salah satu fondasi bagi perumusan Model Ekoteologi Islam Transformatif.

2. Konstruksi Ekoteologi Muhammadiyah

a) Epistemologi Ekoteologi Muhammadiyah: *Tajdid* sebagai Paradigma Pembaruan Lingkungan

Berbeda dengan Nahdlatul Ulama yang mengembangkan respons ekologis melalui tradisi Aswaja, fikih mazhab, pesantren, tasawuf, dan budaya lokal, Muhammadiyah membangun orientasi ekologinya melalui semangat *tajdid* atau pembaruan. Paradigma *tajdid* tidak hanya berkaitan dengan pemurnian akidah dan ibadah, tetapi juga dengan upaya menghadirkan ajaran Islam secara responsif terhadap persoalan sosial kontemporer. Dalam kerangka tersebut, isu lingkungan dapat ditempatkan sebagai bagian dari agenda pembaruan sosial dan dakwah yang membutuhkan respons keagamaan, ilmiah, dan kelembagaan. Dokumen hasil Mukhtamar Muhammadiyah memperlihatkan bahwa persoalan kemanusiaan, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial semakin memperoleh tempat dalam orientasi gerakan persyarikatan (Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2022).

Epistemologi Muhammadiyah pada dasarnya memberi ruang bagi dialog antara wahyu dan rasionalitas. Teks keagamaan dipahami melalui proses ijtihad yang mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan realitas sosial. Dalam konteks ekologis, pendekatan tersebut memungkinkan isu perubahan iklim, degradasi lingkungan, pencemaran, maupun persoalan tata kelola sumber daya dibaca melalui pertemuan antara nilai-nilai normatif Islam dan pengetahuan empiris. Kajian mengenai gerakan ekoteologis Muhammadiyah menunjukkan bahwa respons organisasi terhadap krisis lingkungan berkembang melalui kombinasi antara legitimasi keagamaan, kelembagaan, dan keterlibatan dalam tata kelola lingkungan (Setiawan et al., 2022).

Secara filosofis, paradigma *tajdid* menghasilkan orientasi ekologis yang bersifat adaptif dan transformatif. Lingkungan tidak hanya ditempatkan sebagai objek refleksi teologis, tetapi juga sebagai ruang praksis tempat nilai Islam diterjemahkan melalui pendidikan, penelitian, penguatan kelembagaan, advokasi, dan aksi sosial. Dengan karakter tersebut, ekoteologi Muhammadiyah dapat dibaca sebagai pendekatan yang mengintegrasikan rasionalitas keagamaan dengan ilmu pengetahuan dan kapasitas organisasi dalam merespons persoalan ekologis.

b) Tauhid sebagai Dasar Teologi Sosial-Ekologis

Dalam konstruksi pemikiran Muhammadiyah, tauhid memiliki konsekuensi sosial yang luas. Kesadaran terhadap keesaan Allah tidak berhenti pada afirmasi doktrinal, tetapi menuntut terwujudnya tanggung jawab manusia terhadap ketidakadilan dan penderitaan sosial. Pengembangan teologi sosial Muhammadiyah memperlihatkan adanya hubungan antara keyakinan keagamaan dan tindakan kemanusiaan, sehingga iman dituntut memperoleh aktualisasi dalam kehidupan sosial (Rahman, 2024).

Dalam perspektif ekologis, orientasi tersebut dapat diperluas ke dalam relasi manusia dengan alam. Eksploitasi sumber daya yang menimbulkan penderitaan sosial, kerusakan ekosistem, dan hilangnya akses kelompok rentan terhadap kebutuhan dasar merupakan persoalan yang tidak dapat dilepaskan dari dimensi keadilan. Karena itu, kerusakan lingkungan dapat dipahami tidak semata-mata sebagai persoalan teknis, tetapi juga sebagai persoalan etis dan sosial yang berkaitan dengan cara manusia menjalankan amanah terhadap ciptaan.

Tauhid dengan demikian dapat menjadi basis bagi pembentukan teologi sosial-ekologis. Relasi manusia

dengan Allah menuntut tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Dalam kerangka ini, alam tidak dipahami semata-mata sebagai *natural resources* yang tersedia untuk kepentingan ekonomi, tetapi sebagai bagian dari ciptaan yang pengelolaannya harus mempertimbangkan kemaslahatan dan keberlanjutan. Perspektif demikian juga sejalan dengan kecenderungan gerakan ekoteologis Muhammadiyah yang menghubungkan nilai agama dengan isu tata kelola lingkungan dan keadilan ekologis (Setiawan et al., 2022).

c) Teologi Al-Ma'un dan Rekonstruksi Etika Lingkungan

Salah satu sumber etika sosial yang paling penting dalam Muhammadiyah adalah teologi Al-Ma'un. Secara historis, teologi ini banyak dikaitkan dengan keberpihakan kepada kelompok miskin, pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, dan filantropi. Akan tetapi, perkembangan kajian kontemporer menunjukkan bahwa spirit Al-Ma'un dapat diperluas ke dalam persoalan ekologis, terutama karena dampak krisis lingkungan sering kali paling berat dirasakan oleh masyarakat miskin dan kelompok rentan (Permadi et al., 2022).

Dalam kerangka tersebut, Q.S. al-Ma'un dapat dibaca sebagai kritik terhadap keberagamaan yang berhenti pada ritual tetapi tidak menghasilkan kepedulian sosial. Ketika krisis lingkungan memperburuk kemiskinan, mengurangi akses terhadap air, pangan, kesehatan, dan sumber penghidupan, kepedulian ekologis menjadi bagian dari tanggung jawab kemanusiaan. Dengan demikian, isu lingkungan tidak terpisah dari agenda sosial Muhammadiyah, melainkan dapat ditempatkan sebagai perluasan dari misi pelayanan terhadap kelompok yang terdampak ketidakadilan.

Permadi et al. (2022) menunjukkan bahwa relasi antara teologi Al-Ma'un dan krisis iklim membuka kemungkinan reinterpretasi terhadap tanggung jawab sosial Muhammadiyah dalam konteks ekologis. Perspektif ini menempatkan perlindungan lingkungan bukan semata-mata sebagai konservasi alam, tetapi juga sebagai upaya mencegah dan mengurangi penderitaan manusia akibat degradasi ekologis.

Dengan demikian, teologi Al-Ma'un dapat dikembangkan menjadi etika sosial-ekologis yang menghubungkan filantropi, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan. Orientasi *amar ma'ruf nahi munkar* tidak hanya diarahkan kepada perilaku individual, tetapi juga dapat mencakup kritik terhadap praktik sosial, ekonomi, dan kebijakan yang menimbulkan kerusakan ekologis serta memperbesar kerentanan masyarakat.

d) Institusionalisasi Gerakan Ekologis Muhammadiyah

Karakter penting ekoteologi Muhammadiyah terletak pada kecenderungannya untuk menerjemahkan nilai keagamaan melalui struktur organisasi. Kajian Setiawan et al. (2022) menunjukkan bahwa Majelis Lingkungan Hidup Muhammadiyah menjadi salah satu aktor penting dalam respons organisasi terhadap krisis tata kelola lingkungan. Kehadiran struktur kelembagaan tersebut memperlihatkan bahwa isu lingkungan telah bergerak dari ruang wacana menuju agenda organisasi yang dapat dikembangkan melalui pendidikan, advokasi, penguatan komunitas, dan kerja sama lintas lembaga.

Orientasi tersebut juga terlihat melalui berkembangnya aktivisme lingkungan di kalangan kader Muhammadiyah. Nurdin (2024) menunjukkan adanya upaya penguatan dakwah lingkungan dan gerakan kader hijau yang menempatkan persoalan ekologis sebagai bagian dari agenda dakwah dan gerakan sosial. Perkembangan ini menunjukkan bahwa kesadaran lingkungan mulai memperoleh bentuk organisatoris yang lebih jelas dalam jaringan Muhammadiyah.

Pendekatan kelembagaan memberikan Muhammadiyah kemampuan untuk mengintegrasikan isu ekologis ke dalam jaringan pendidikan, perguruan tinggi, pelayanan kesehatan, dan organisasi sosial yang dimilikinya. Potensi tersebut memungkinkan gagasan keberlanjutan diterjemahkan tidak hanya sebagai perilaku individu, tetapi sebagai bagian dari tata kelola kelembagaan. Namun, bentuk dan tingkat implementasinya tetap dapat berbeda antarlembaga sehingga tidak tepat diasumsikan telah berlangsung secara seragam pada seluruh institusi Muhammadiyah.

Dalam konteks religious environmentalism di Indonesia, perkembangan tersebut menunjukkan semakin besarnya peran organisasi keagamaan sebagai aktor yang menghubungkan etika, politik, dan kebijakan lingkungan (Billahi et al., 2025). Oleh sebab itu, kekuatan utama model ekologis Muhammadiyah dapat ditemukan pada kapasitas organisasinya dalam mengubah gagasan normatif menjadi program, jaringan, dan struktur kelembagaan.

Secara komparatif, karakter tersebut berbeda dari kecenderungan NU yang lebih banyak bertumpu pada pesantren, budaya lokal, fikih mazhab, dan jaringan komunitas. Kajian perbandingan pemikiran hukum lingkungan NU dan Muhammadiyah juga menunjukkan adanya perbedaan cara kedua organisasi menghubungkan teks agama, konteks, dan konservasi alam (Alamri et al., 2025). Perbedaan ini tidak menunjukkan pertentangan substantif dalam tujuan ekologis, tetapi memperlihatkan keberagaman epistemologi dan strategi transformasi dalam Islam Indonesia.

Berdasarkan temuan tersebut, konstruksi ekoteologi Muhammadiyah dapat dipahami sebagai model institusional-transformatif, yakni model yang mengintegrasikan nilai teologis, rasionalitas keagamaan, ilmu pengetahuan, pendidikan, kapasitas organisasi, dan aksi sosial dalam merespons persoalan lingkungan. Model ini

memberikan kontribusi penting dalam perkembangan ekoteologi Islam Indonesia karena menunjukkan bahwa transformasi ekologis dapat dibangun melalui reformasi kelembagaan dan penguatan sistem sosial.

e) Ekoteologi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah: Menuju Model Ekoteologi Islam Transformatif

Analisis komparatif terhadap Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah menunjukkan bahwa kedua organisasi berkembang melalui tradisi intelektual dan kelembagaan yang berbeda, tetapi memiliki sejumlah fondasi normatif yang relatif beririsan dalam memahami tanggung jawab ekologis. Kajian terdahulu mengenai gerakan ekoteologi kedua organisasi menunjukkan bahwa NU dan Muhammadiyah sama-sama memiliki sumber teologis yang dapat digunakan untuk membangun kesadaran lingkungan, meskipun artikulasi dan strategi gerakannya tidak identik (Mardhiah et al., 2014).

Persamaan pertama terletak pada posisi tauhid sebagai dasar relasi manusia dengan Tuhan dan ciptaan. Dalam kerangka ekoteologi Islam, pengakuan terhadap Allah sebagai Pencipta memiliki konsekuensi terhadap cara manusia memperlakukan alam. Lingkungan tidak hanya memiliki nilai instrumental berdasarkan kegunaannya bagi manusia, tetapi merupakan bagian dari ciptaan yang keberadaannya terkait dengan tanggung jawab moral manusia. Dengan demikian, pelestarian lingkungan memperoleh dasar keagamaan melalui hubungan antara iman, amanah, dan tanggung jawab terhadap kehidupan.

Persamaan berikutnya tampak dalam penggunaan konsep *khalifah fi al-ard*. Baik dalam diskursus ekologis NU maupun Muhammadiyah, manusia tidak idealnya dipahami sebagai penguasa absolut alam, tetapi sebagai pengelola yang bertanggung jawab. Konsep khalifah memberikan legitimasi terhadap pemanfaatan alam sekaligus membatasi tindakan manusia melalui prinsip kemaslahatan, keseimbangan, dan larangan kerusakan. Dengan demikian, keistimewaan manusia justru memperbesar tanggung jawab ekologisnya.

Persamaan lain berkaitan dengan perkembangan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kerangka normatif lingkungan. Perlindungan ekosistem memiliki hubungan langsung dengan keberlangsungan jiwa, keturunan, harta, kesehatan, dan kehidupan sosial manusia. Karena itu, diskursus kontemporer mulai mengembangkan gagasan *ḥifẓ al-bī'ah* sebagai bentuk perluasan orientasi *maqāṣid* dalam merespons krisis ekologis dan perubahan iklim (Khuluq, 2024). Kerangka tersebut memungkinkan perlindungan lingkungan ditempatkan bukan sekadar sebagai persoalan tambahan, tetapi sebagai prasyarat bagi terpenuhinya tujuan-tujuan syariat.

Meskipun memiliki fondasi normatif yang beririsan, NU dan Muhammadiyah membangun kesadaran ekologis melalui jalur epistemologis yang berbeda. NU mengembangkan pemikiran ekologis melalui tradisi Aswaja, fikih mazhab, tasawuf, pesantren, dan budaya lokal. Pengetahuan dan etika lingkungan berkembang melalui dialog antara teks klasik, otoritas ulama, pengalaman komunitas, dan kearifan lokal. Oleh karena itu, transformasi ekologis NU lebih banyak memperoleh kekuatannya melalui internalisasi nilai dan partisipasi komunitas. Karakter tersebut dapat disebut sebagai model **kultural-partisipatif**.

Muhammadiyah, sebaliknya, lebih menonjolkan paradigma *tajdid*, rasionalitas, dan kapasitas kelembagaan. Pengetahuan ekologis dikembangkan melalui dialog antara sumber normatif Islam, perkembangan ilmu pengetahuan, dan kebutuhan tata kelola sosial. Dengan demikian, lembaga pendidikan, perguruan tinggi, majelis organisasi, dan jaringan pelayanan sosial memiliki potensi menjadi instrumen utama transformasi. Karakter tersebut membentuk model **institusional-transformatif**.

Perbedaan ini juga tampak pada ranah praksis. Dalam lingkungan NU, pesantren, Bahtsul Masā'il, kearifan lokal, komunitas, dan lembaga penanggulangan bencana serta perubahan iklim memainkan peranan penting dalam membangun gerakan ekologis. Sementara itu, Muhammadiyah lebih banyak mengembangkan praksis melalui majelis organisasi, jaringan pendidikan, gerakan kader, dan institusi pelayanan sosial. Fannani (2025) menunjukkan bahwa nilai Aswaja dan teologi Al-Ma'un bahkan dapat dipertemukan dalam aktivisme lingkungan lokal, yang menandakan adanya peluang besar bagi sinergi ekologis kedua tradisi.

Perbedaan tersebut karena itu tidak semestinya dibaca melalui oposisi sederhana antara pendekatan *bottom-up* dan *top-down*. Kedua organisasi sama-sama memiliki dinamika komunitas dan kelembagaan. Namun, berdasarkan kecenderungan yang muncul dalam literatur, NU relatif lebih kuat dalam artikulasi kultural dan komunitarian, sedangkan Muhammadiyah relatif menonjol dalam kapasitas institusional dan sistematis. Perbedaan ini lebih tepat dipahami sebagai variasi strategi transformasi ekologis.

Dari sintesis tersebut, penelitian ini mengusulkan **Model Ekoteologi Islam Transformatif** sebagai kerangka konseptual yang mengintegrasikan kekuatan masing-masing pendekatan. Model ini berangkat dari kritik terhadap ekoteologi yang hanya berhenti pada diskursus normatif tanpa transformasi sosial, sekaligus terhadap pendekatan teknokratis yang mengandalkan regulasi dan teknologi tanpa memperhatikan dimensi moral dan spiritual masyarakat.

Pada dimensi teologis, Model Ekoteologi Islam Transformatif menjadikan tauhid, khalifah, amanah, *mīzān*, dan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai landasan normatif bagi perlindungan lingkungan. Konsep-konsep tersebut memberikan legitimasi religius bahwa manusia memiliki tanggung jawab terhadap keberlanjutan kehidupan dan tidak memiliki hak absolut untuk mengeksploitasi alam. Gagasan *ḥifẓ al-bī'ah* memperkuat argumentasi bahwa pemeliharaan lingkungan dapat ditempatkan dalam orientasi tujuan syariat kontemporer (Khuluq, 2024).

Pada dimensi etis, model ini mengembangkan karakter ekologis berdasarkan kesederhanaan, tanggung

jawab, keadilan, pengendalian konsumsi, solidaritas, dan kepedulian terhadap generasi mendatang. Dalam konteks ini, tradisi spiritual NU dan orientasi sosial Muhammadiyah dapat dipertemukan sebagai dua sumber pembentukan etika lingkungan. Spiritualitas memberikan dasar transformasi batin, sedangkan teologi sosial mendorong aktualisasi nilai dalam kehidupan publik.

Dimensi kultural menempatkan pesantren, komunitas keagamaan, tradisi lokal, dan modal sosial sebagai media internalisasi nilai ekologis. Kontribusi pendekatan NU menjadi penting pada level ini karena kesadaran lingkungan membutuhkan penerimaan budaya dan partisipasi masyarakat. Transformasi ekologis yang tidak memiliki akar sosial berisiko berhenti pada program temporer tanpa perubahan perilaku yang berkelanjutan.

Sementara itu, dimensi ilmiah dan kelembagaan menempatkan pendidikan, penelitian, teknologi, tata kelola organisasi, dan advokasi kebijakan sebagai instrumen implementasi. Kapasitas Muhammadiyah dalam mengembangkan institusi modern memberikan kontribusi penting pada dimensi ini. Nilai ekologis membutuhkan sistem yang memungkinkan perubahan perilaku menjadi kebijakan, standar kelembagaan, dan praktik organisasi yang dapat dipertahankan.

Seluruh dimensi tersebut diarahkan pada transformasi sosial. Tujuan akhirnya bukan hanya membentuk individu yang memiliki kesadaran ekologis, tetapi mendorong perubahan perilaku kolektif, reformasi kelembagaan, dan kebijakan publik yang semakin berorientasi pada keadilan ekologis. Dengan demikian, ekoteologi berfungsi sebagai jembatan antara refleksi keagamaan dan tindakan sosial.

Model Ekoteologi Islam Transformatif memberikan beberapa kontribusi konseptual. Pertama, model ini memperluas ekoteologi Islam dari diskursus normatif menuju kerangka yang mengintegrasikan teologi, etika, budaya, ilmu pengetahuan, dan kelembagaan. Kedua, perbedaan epistemologis NU dan Muhammadiyah ditempatkan bukan sebagai hambatan, tetapi sebagai sumber komplementaritas dalam pengembangan gerakan lingkungan Islam. Ketiga, model ini membuka kemungkinan keterlibatan organisasi keagamaan secara lebih strategis dalam pembangunan berkelanjutan dan pencapaian agenda ekologis nasional maupun global.

Berdasarkan keseluruhan analisis, efektivitas gerakan lingkungan Islam Indonesia tidak harus bertumpu pada dominasi salah satu model. Pendekatan kultural-partisipatif NU memberikan basis sosial dan legitimasi komunitarian, sementara pendekatan institusional-transformatif Muhammadiyah menyediakan kapasitas sistemik untuk menerjemahkan nilai ekologis ke dalam pendidikan, tata kelola, dan program organisasi. Integrasi keduanya membentuk kemungkinan paradigma ekoteologi Islam yang tidak hanya kuat secara normatif, tetapi juga memiliki kapasitas transformasi sosial. Dalam kerangka tersebut, Model Ekoteologi Islam Transformatif dapat dipahami sebagai sintesis antara kesadaran teologis, pembentukan budaya ekologis, penguatan institusi, dan perubahan sosial menuju kehidupan yang lebih adil serta berkelanjutan.

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa krisis ekologis kontemporer tidak lagi dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan teknis, melainkan merupakan krisis multidimensional yang berakar pada persoalan teologis, etis, sosial, dan kultural. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang religius, agama memiliki potensi strategis sebagai sumber nilai sekaligus kekuatan transformasi sosial dalam membangun kesadaran ekologis. Analisis terhadap konstruksi pemikiran dan praksis ekoteologi Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah memperlihatkan bahwa kedua organisasi Islam terbesar di Indonesia telah mengembangkan paradigma teologi lingkungan yang berupaya menjawab tantangan kerusakan lingkungan melalui pendekatan yang berbeda, namun memiliki orientasi yang sama, yaitu mewujudkan kemaslahatan ekologis berdasarkan nilai-nilai Islam.

Penelitian ini menemukan bahwa terdapat persamaan fundamental dalam landasan normatif kedua organisasi. Baik Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah membangun paradigma ekoteologi berdasarkan prinsip tauhid, khalifah fi al-ardh, amanah, mīzān, dan maqāṣid al-syarī'ah. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar ontologis bahwa hubungan manusia dengan alam merupakan bagian integral dari hubungan manusia dengan Allah. Oleh karena itu, pelestarian lingkungan dipandang sebagai manifestasi keimanan, sedangkan kerusakan lingkungan merupakan bentuk pelanggaran terhadap amanah Ilahi. Dengan demikian, kedua organisasi berhasil menggeser paradigma lingkungan dari pendekatan yang bersifat antroposentris menuju paradigma teo-ekologis yang menempatkan Allah sebagai pusat relasi kosmis.

Di balik kesamaan tersebut, penelitian ini juga mengungkap adanya perbedaan epistemologis yang signifikan. Nahdlatul Ulama mengembangkan ekoteologi melalui pendekatan Ahlul-sunnah wa al-Jamā'ah, fikih lingkungan, tasawuf, budaya lokal, tradisi pesantren, dan mekanisme Bahtsul Masā'il. Pendekatan ini menghasilkan model ekoteologi yang bercorak kultural-partisipatif, yaitu paradigma yang menekankan internalisasi nilai-nilai ekologis melalui pembentukan kesadaran komunitas, penguatan tradisi, dan pemberdayaan masyarakat. Sebaliknya, Muhammadiyah mengembangkan ekoteologi melalui paradigma tajdid, rasionalitas ilmiah, pendidikan modern, filantropi, serta penguatan kelembagaan melalui Green Muhammadiyah dan Majelis Lingkungan Hidup. Pendekatan ini menghasilkan model ekoteologi institusional-transformatif yang menekankan perubahan melalui tata kelola organisasi, pendidikan, inovasi ilmiah, dan advokasi kebijakan publik.

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan paradigma tersebut tidak mencerminkan

pertentangan, melainkan hubungan yang bersifat komplementer. Nahdlatul Ulama memiliki kekuatan dalam membangun budaya ekologis melalui pendekatan spiritual, kultural, dan komunitarian, sedangkan Muhammadiyah memiliki keunggulan dalam membangun sistem ekologis melalui pendekatan kelembagaan dan pendidikan. Sinergi kedua pendekatan tersebut memberikan fondasi yang lebih komprehensif bagi pengembangan gerakan lingkungan Islam di Indonesia. Kontribusi teoretis utama penelitian ini adalah formulasi Model Ekoteologi Islam Transformatif sebagai sintesis konseptual antara paradigma kultural-partisipatif Nahdlatul Ulama dan paradigma institusional-transformatif Muhammadiyah. Model ini mengintegrasikan lima dimensi utama, yaitu dimensi teologis, etis, kultural, ilmiah-kelembagaan, dan transformasi sosial. Integrasi tersebut menunjukkan bahwa penguatan ekoteologi tidak cukup berhenti pada legitimasi normatif atau pembentukan kesadaran moral, tetapi harus diwujudkan melalui reformasi kelembagaan, pendidikan lingkungan, kebijakan publik, inovasi ilmiah, serta perubahan perilaku ekologis masyarakat secara berkelanjutan. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa organisasi keagamaan memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal dalam menghadapi krisis ekologis. Penguatan kolaborasi antara NU dan Muhammadiyah berpotensi memperluas jangkauan gerakan lingkungan berbasis agama, meningkatkan literasi ekologis masyarakat, memperkuat implementasi pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals), serta mendorong lahirnya kebijakan publik yang lebih berorientasi pada keadilan ekologis. Dengan demikian, masa depan ekoteologi Islam Indonesia tidak bergantung pada dominasi salah satu paradigma, melainkan pada kemampuan membangun sinergi antara spiritualitas, budaya, ilmu pengetahuan, dan tata kelola kelembagaan sebagai fondasi transformasi ekologis yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Billahi, S., Wijsen, F., & Bagir, Z. A. (2025). Revisiting religious environmentalism in Indonesia: Navigating ethics, politics, and policy. *Studi Islamika*, 32(3), 405–419.
- Fannani, B. (2025). Aswaja and Al-Ma'un theology in Brantas River preservation: Local Muslim environmental activism and Indonesia's green constitution. *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, 15(2), 350–377. <https://doi.org/10.15642/teosofi.2025.15.2.350-377>
- Firmando, H. G., & Setiawati, C. (2025). Ekoteologi Aswaja: Integrasi nilai-nilai Nahdlatul Ulama dalam etika lingkungan. *Nahnu: Journal of Nahdlatul Ulama and Contemporary Islamic Studies*, 3(2), 603–632.
- Heriyanti, L., Wijayanti, A., & Pakpahan, F. N. (2024). Climate crisis and social inequality: A bibliometric review of environmental sociology research (2014–2024). *Socio-Political Communication and Policy Review*, 1(5), 52–76.
- Huda, M. K. (2023). Kontribusi komunitas NU dalam isu kelestarian lingkungan hidup di Indonesia. *Jurnal Dialektika Politik*, 7(2), 170–186.
- Ilmia, L., & Salsabila, F. (2025). Peran strategis LPBI NU Jombang: Solusi lokal dalam mitigasi perubahan iklim global. *Frequency of International Relations*, 7(1), 70–94.
- Ikhwan, M., Romdhoni, M. A., & Djazilan, M. S. (2021). Fiqih al-bi'ah: Strategi membangun Islamic environmentalism di pesantren Kota Surabaya. *Al-Iman: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan*, 5(1), 41–61.
- Ismail, A. I., & Uyuni, B. (2019). Ghazali's Sufism and its influence in Indonesia. *DINIKA: Academic Journal of Islamic Studies*, 4(1). <https://doi.org/10.22515/dinika.v4i1.1712>
- Jasin, M. R., Alamri, M. S. A., Muslimin, J. M., & Mukti, K. W. (2025). Text, context and natural conservation: An analysis of Muhammadiyah's and Nahdlatul Ulama's Islamic legal thought on fiqh of environment. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, 25(2), 690–715.
- Jenkins, W. (2009). After Lynn White: Religious ethics and environmental problems. *The Journal of Religious Ethics*, 37(2), 283–309.
- Khuluq, M. K. (2024). Hifz al-bi'ah as part of maqashid al-shari'ah and its relevance in the context of global climate change. *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies (IJIIS)*, 7(2). <https://doi.org/10.20885/ijiis.vol7.iss2.art3>
- Maghfiroh, M., et al. (2024). Promoting green pesantren: Change, challenge and contribution of Nahdlatul Ulama in Indonesia. *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2), 409–435.
- Mahfudin, A. (2021). Metodologi istinbath hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6, 1–17.
- Mardhiah, I., Aulia, R. N., & Narulita, S. (2014). Konsep gerakan ekoteologi Islam: Studi atas Ormas NU dan Muhammadiyah. *Studi Al-Qur'an: Membangun Tradisi Berfikir Qur'ani*, 10(1), 1–14.
- Mawardi, M. (2007). *Teologi lingkungan: Teologi pengelolaan lingkungan dalam perspektif Islam*.
- Muflih, B. K., & Jamaludin, M. A. (2025). Amorti: Jurnal studi Islam interdisipliner. *Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner*, 4(1), 1–8.
- Nurdin, A. R. (2024). Dakwah lingkungan, kader hijau Muhammadiyah, gerakan lingkungan hidup. *JSIM: Jurnal*

Ilmu Sosial dan Pendidikan, 4(6), 959–969.

- Permadi, I., et al. (2022). Al Maun and climate crisis: Dynamic between Muhammadiyah and indigenous communities in 21th century. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 42(1), 95–110. <https://doi.org/10.21580/jid.v42.1.11216>
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (2022). *Keputusan tanfidz Muhammadiyah Muktamar ke-48*. https://pwmjatim.org/uploads/6_Tanfidz_Muktamar_ke_48_Muhammadiyah_di_Solo.pdf
- Putra, D. I. A., Rafii, M., & Ansusa, D. I. (2025). Seizing Ahlussunah wal Jama'ah: The identity contesting in hermeneutic digital platform in Indonesia. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 15(2), 402–418.
- Rahman, A. F. (2024). *Teologi sosial Muhammadiyah dan implementasinya dalam gerakan sosial kemanusiaan*.
- Rakhmat, A. (2022). Islamic ecotheology: Understanding the concept of khalifah and the ethical responsibility of the environment. *Academic Journal of Islamic Principles and Philosophy*, 3(1), 1–24. <https://doi.org/10.22515/ajipp.v3i1.5104>
- Riyadi, A. K. (2012). Genealogi teologi Nahdlatul Ulama. *Islamica*, 6(2), 77–78.
- Rudwan, A. U. N. K. (2023). *Ikhtisar sejarah NU 1344 H/1926 M*. LTN NU Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- Setiawan, H., Kurniawan, N. I., & Santoso, P. (2022). The ecotheological movement of the Muhammadiyah Environmental Council in responding to the environmental governance crisis. *Millah: Journal of Religious Studies*, 21(3), 639–670. <https://doi.org/10.20885/millah.vol21.iss3.art2>
- Suratin, S. I., & Fadlillah, M. R. (2025). Ekoteologi Islam: Menjelajahi hubungan spiritual antara manusia, alam, dan Tuhan dalam tradisi Islam. *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam*, 6(1), 13.
- Wasil, W., & Muizudin, M. (2023). Ekoteologi dalam menyikapi krisis ekologi di Indonesia perspektif Seyyed Hossein Nasr. *Refleksi*, 22(1), 179–202. <https://doi.org/10.15408/ref.v22i1.31403>
- Yulisinta, F., Murniati, J., & Eigenstetter, M. (2024). Spiritual ecology and indigenous wisdom: Cultural foundations for sustainable environmental practices in Indonesia. *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya*, 8, 186–202.
- Zuhdi, M. H. (2015). Fiqh al-bi'ah: Tawaran hukum Islam dalam mengatasi krisis ekologi. *Al-'Adalah*, 12(35), 771–783.